

# LAPORAN BULAN FEBRUARI

**PROVINSI PAPUA**



- Pokja Papua Sehat ●
- Pokja Papua Produktif ●
- Pokja Papua Cerdas ●
- Pokja Papua POLHUKAM ●



## **Ringkasan Eksekutif**

Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua sepanjang Februari 2026 melaksanakan berbagai kegiatan strategis dalam empat klaster utama: Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Polhukam. Kegiatan ini difokuskan pada konektivitas kerja BP3OKP/BPP Bersama MRP komitmen terhadap penguatan pendidikan adat, pemberdayaan ekonomi masyarakat di Sentani, serta dukungan bagi mahasiswa keluarga pejuang PEPERA.

Di sisi lain, langkah strategis juga difokuskan pada persiapan Kongres Bahasa Daerah 2026 dan pembentukan panitia KBD, sekaligus memperkuat sinergi kelembagaan antara BP3OKP/BPP dan Majelis Rakyat Papua guna mendorong efektivitas program pembangunan dan pelestarian budaya., komitmen penguatan ekonomi kerakyatan OAP sekaligus mempererat sinergi lintas lembaga dan mitra strategis di Papua. Hingga komitmen terhadap penguatan adat, sinergi kelembagaan, pemberdayaan pendidikan, serta penegakan hukum demi menjaga stabilitas dan martabat "Rumah Besar Papua.

Rekomendasi utama dari seluruh kegiatan menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, peningkatan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat adat, serta kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, BP3OKP menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi, memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, serta mewujudkan pembangunan Papua yang sehat, cerdas, produktif, dan berkeadilan menuju visi Papua Emas 2041.

## **BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PAPUA (BP3OKP) /BPP PERWAKILAN PROVINSI PAPUA**


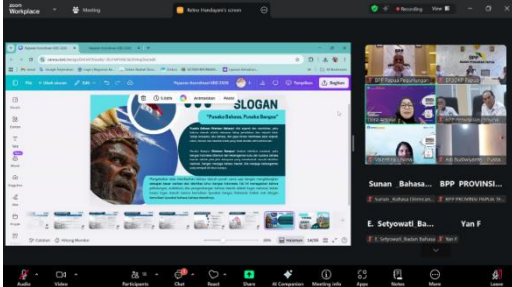



**ALBERTH YOKU, S.Ag**  
**Anggota BPP RI Provinsi Papua**



1. Kegiatan Strategis

Anggota Badan dan Kelompok Kerja (Pokja) BP3OKP telah melaksanakan kegiatan strategis sebagai berikut:  
Anggota Badan Pengarah Papua Provinsi Papua

No	Kegiatan Strategis	Waktu (Tanggal)	Tujuan	Hasil	Gambar (Muat 1 – 2 Gambar)
1.	Diskusi pengembangan usaha OAP berbasis klan dan marga meliputi sagu, pala, kayu manis, dan penampungan ikan bagi nelayan binaan.	09.00 – 11.00 WIT (2 Februari 2026)	Memperoleh masukan dan data dari kelompok masyarakat adat terkait rencana pengembangan usaha pembenihan ikan air tawar serta penetapan kawasan penanaman pohon sagu.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Akta Pendirian Yayasan Khouw Bersatu Papua.</li> <li>2. Proposal revitalisasi kawasan tanaman sagu.</li> <li>3. Proposal pengembangan budidaya ikan air tawar di Danau Sentani.</li> <li>4. Proposal pembentukan Unit Pembenihan Rakyat (UPR).</li> </ol>	
2	RAKOR : Kongres Bahasa Daerah – Badan Bahasa & Balai Bahasa	11.00 – 14.40 WIT (2 Februari 2026)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas Tahapan Kongres Bahasa Daerah</li> <li>- Rincian Biaya</li> </ul>	BP3OKP akan berkoordinasi dengan Pemda untuk kelancaran kegiatan dan dilanjutkan pembentukan Panitia (SK Menteri)	 





3.	Kunjungan lapangan lanjutan dalam rangka pembahasan usaha penampungan ikan bagi OAP di Sentani.	10.00 – 16.00 WIT (4 Februari 2026)	Meninjau secara langsung usaha pembenihan ikan air tawar di kawasan Danau Sentani serta lahan penanaman sagu yang telah disiapkan oleh masyarakat adat di sekitarnya.	Berdasarkan hasil kunjungan lapangan, program ini dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan dan perlu mendapat perhatian serta dukungan lebih lanjut dari BP3OKP dan pemerintah guna mendorong keberlanjutan usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.	
4.	Penyerahan Beasiswa kepada Mahasiswa keluarga Pejuang PEPERA.	09.00 – 12.00 WIT (6 Februari 2026)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan negara/organisasi atas jasa para pejuang PEPERA dalam proses integrasi Papua ke NKRI.</li><li>2. Memastikan keturunan para pejuang mendapatkan akses pendidikan tinggi yang layak guna mencetak generasi penerus Papua yang kompeten.</li><li>3. Mengurangi beban ekonomi keluarga sehingga mahasiswa dapat lebih fokus</li></ol>	Beasiswa diserahkan oleh Yayasan Pepera Peduli Pendidikan Generasi Muda (Yayasan Pepera) sebagai wujud komitmen berkelanjutan. <ul style="list-style-type: none"><li>• Bantuan ini difokuskan untuk membantu biaya perkuliahan mahasiswa yang sedang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Papua.</li><li>• Secara simbolis, penyerahan ini bertujuan meningkatkan semangat belajar mahasiswa agar dapat menjadi SDM unggul bagi masa depan Papua.</li><li>• Yayasan menegaskan konsistensinya dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia di Tanah Papua melalui pemberian hak pendidikan bagi keluarga pejuang</li></ul>	 






			meraih prestasi akademik.		
5.	<b>ST-12/SETBPP/JYP/2026</b> Agenda kegiatan meliputi: <ul style="list-style-type: none"><li>• Pertemuan bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah</li><li>• Pertemuan Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026</li></ul>	(8 s.d. 11 Februari 2026)	Memperkuat kedaulatan Bahasa Indonesia dan revitalisasi bahasa daerah dalam konsolidasi nasional pendidikan dasar dan menengah 2026.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Teridentifikasi isu strategis (koordinasi pusat–daerah, penguatan bahasa daerah, optimalisasi BIPA).</li><li>• Ditemukan kendala regulasi, pendanaan, literasi, dan SDM.</li><li>• Tercatat beberapa praktik baik di daerah dan luar negeri.</li></ul>	
6.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Celebrating the World's Richest Island Flora: Biodiversity, Prosperity, and Climate Resilience</li><li>• The Papua Biocultural &amp; Climate Week 2026.</li></ul>	(12 s.d. 13 Februari 2026)	BP3OKP Bersama Pemda menyatukan persepsi terkait Pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangan ekosistem alam (Kegiatan Manokwari)	Terbitnya Komitmen Bersama untuk membangun Papua dengan tetap mempertahankan keanekaragaman hayati di dalamnya.	



7.	Rapat koordinasi DPR Papua bersama BPP Provinsi Papua.  Papua Produktif	11.00 – 13.00 WIT (19 Februari 2026)	FGD Utk mendpt ttg pelaksanaan tugas sebagaimana yg diamanatkan dlm PP nmr. 106 Thn 2021 ttg kewenangan dan kelembagaan dlm pelaksanaan kebijakan OTSUS.	1. Evaluasi dan Koordinasi akan selalu dilakukan. 2. Fraksi DPR akan melakukan Koordinasi dengan Pokja-pokja di BP3OKP.	
8.	Diskusi Pembahasan Persiapan Kongres Bahasa Daerah 2026.  Papua Cerdas	10.00 – 12.00 WIT (20 Februari 2026)	Menindaklanjuti rapat sebelumnya untuk melihat arah tindak lanjut persiapan kongres	Menentukan Ekidna (Hewan Endemik Papua) sebagai mascot	



9.	Konektivitas Kerja BP3OKP/BPP Bersama MRP	11.00 – 16.00 WIT (23 Februari 2026)	Membahas korelasi tusi dengan Dewan Kehormatan MRP Papua	Tindak lanjut pertemuan lanjutan untuk memperkuat sinergitas Lembaga-lembaga otonomi khusus papua.	 
10.	Rapat Pembentukan Panitia KBD	11.00 – 13.00 WIT (25 Februari 2026)	Membahas posisi dan struktur personal dalam SK Panitia Kongres Bahasa Daerah	Draft perlu di diskusikan internal untuk melihat posisi strategis dalam kepanitiaan.	



## Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua

*GKN Lantai 4 Jl. Ahmad Yani Jayapura Papua*

### Anggota Badan Pengarah Papua Provinsi Papua

No	Nama Kegiatan	Rekomendasi
1.	Diskusi pengembangan usaha OAP berbasis klan dan marga meliputi sagu, pala, kayu manis, dan penampungan ikan bagi nelayan binaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong pengembangan dan hilirisasi sagu sebagai komoditas strategis yang berpotensi menopang ketahanan pangan global melalui peningkatan produksi, inovasi produk turunan, serta perluasan akses pasar nasional dan internasional.</li> <li>• Memperkuat peran sagu sebagai pilar ketahanan pangan nasional dengan mengurangi ketergantungan pada beras melalui program diversifikasi pangan, edukasi konsumsi lokal, serta dukungan kebijakan dan anggaran yang berpihak pada komoditas sagu.</li> </ul>
2.	RAKOR : Kongres Bahasa Daerah – Badan Bahasa & Balai Bahasa	Koordinasi intens dengan Pemda Prov/Kab/Kota untuk keberlangsungan kegiatan
3.	Kunjungan lapangan lanjutan dalam rangka pembahasan usaha penampungan ikan bagi OAP di Sentani.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu mengidentifikasi potensi pengembangan pembenihan ikan air tawar didanau Sentani.</li> <li>2. Perlu ada tempat pengelola pembenihan ikan air tawar di danau sentani.</li> <li>3. Perlu adanya sarana prasarana untuk pembenihan ikan air tawar tersebut.</li> <li>4. Meningkatkan kerja sama antara Dinas Perikanan Provinsi, Kabupaten dan BP3OKP utk pengelola pembenihan ikan air tawar.di danau sentani.</li> </ol>
4.	Penyerahan Beasiswa kepada Mahasiswa keluarga Pejuang PEPERA.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan ini difokuskan untuk membantu biaya perkuliahan mahasiswa yang sedang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Papua.</li> <li>2. Secara simbolis, penyerahan ini bertujuan meningkatkan semangat belajar mahasiswa agar dapat menjadi SDM unggul bagi masa depan Papua.</li> <li>3. Yayasan menegaskan konsistensinya dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia di Tanah Papua melalui pemberian hak pendidikan bagi keluarga pejuang</li> </ol>
5.	<b>ST-12/SETBPP/JYP/2026</b> Agenda kegiatan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertemuan bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah</li> <li>• Pertemuan Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkuat koordinasi dan regulasi kebahasaan pusat–daerah.</li> <li>• Tingkatkan literasi dan pemberdayaan bahasa daerah berbasis kurikulum dan teknologi.</li> <li>• Standarisasi dan optimalkan pembelajaran BIPA dalam dan luar negeri.</li> </ul>
6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Celebrating the World's Richest Island Flora: Biodiversity, Prosperity, and Climate Resilience</li> <li>• The Papua Biocultural &amp; Climate Week 2026.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penandatanganan komitmen bersama Papua–Papua Barat dalam perlindungan biodiversitas dan pembangunan rendah karbon.</li> <li>• Penguatan peran masyarakat adat dalam pengelolaan flora endemik dan ketahanan iklim.</li> <li>• Pengembangan ekonomi hijau berbasis hasil hutan bukan kayu dan bioindustri lokal.</li> </ul>



**Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua**  
*GKN Lantai 4 Jl. Ahmad Yani Jayapura Papua*

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaksanaan forum ilmiah dan investasi hijau untuk mendukung pembiayaan konservasi berkelanjutan.</li><li>• Penyusunan deklarasi bersama sebagai arah kebijakan kolaborasi jangka panjang.</li></ul>
7.	Rapat koordinasi DPR Papua bersama BPP Provinsi Papua.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Kelompok Khusus (DPRP Kelompok Khusus) memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Otsus.</li><li>2. Pemerintah Provinsi Papua meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Otsus.</li><li>3. Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Otsus.</li></ol>
8.	Diskusi Pembahasan Persiapan Kongres Bahasa Daerah 2026.	Perlu dukungan jasa designer 3d dan animator untuk display mascot kongres
9.	Konektivitas Kerja BP3OKP/BPP Bersama MRP	Jadwalkan pertemuan ruting triwulan untuk penguatan dan sinergisitas antar Lembaga
10.	Rapat Pembentukan Panitia KBD	Panitia perlu di bentuk dengan komposisi panitia local dan pusat untuk memudahkan koordinasi.

2 Februari 2026 - Penguatan Usaha OAP Berbasis Klan dan Marga pada Komoditas Lokal Papua Produktif



2 Februari 2026 - Zoom bersama BGTK



4 Februari 2026 -Kunjungan Lapangan Penguatan Usaha OAP Berbasis Klan dan Marga pada Komoditas Lokal Papua Produktif



6 Februari 2026 - Penyerahan Beasiswa kepada Keluarga Pejuang Pepera



8 - 9 Februari Kemendikdasmen



11 - 13 Februari Gubernur Papua Barat



19 Februari 2026 - DPR Papua



20 Februari 2026 - Balai Bahasa



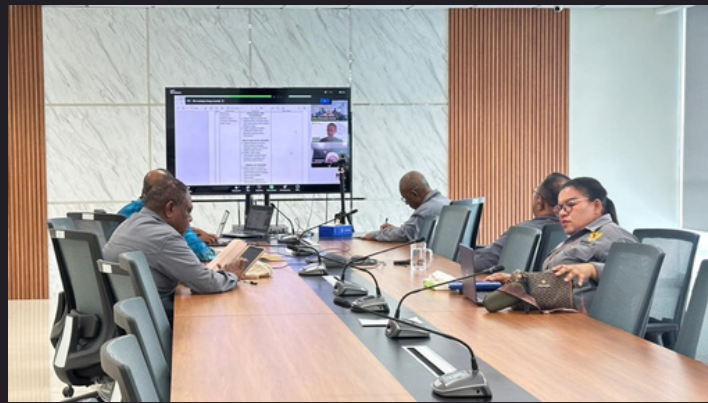
23 Februari 2026 - MRP



25 Februari 2026\_zoom Kemendikdasmen bersama BPP



26 Februari 2026\_Zoom Apkasindo keerom




27 Februari 2026 Rapat Apkasindo keerom



**AGENDA ANGGOTA BADAN PENGARAH PAPUA PROVINSI PAPUA**





Kelompok Kerja  
Papua Polhukam Perwakilan Provinsi Papua

No	Kegiatan Strategis	Waktu (Tanggal)	Tujuan	Hasil	Gambar (Muat 1 – 2 Gambar)
1.	Penyerahan Beasiswa kepada Mahasiswa keluarga Pejuang PEPERA.	09.00 – selesai (6 Februari 2026)	<ol style="list-style-type: none"><li>Sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan negara/organisasi atas jasa para pejuang PEPERA dalam proses integrasi Papua ke NKRI.</li><li>Memastikan keturunan para pejuang mendapatkan akses pendidikan tinggi yang layak guna mencetak generasi penerus Papua yang kompeten.</li><li>Mengurangi beban ekonomi keluarga sehingga mahasiswa dapat lebih fokus meraih prestasi akademik.</li></ol>	<p>Beasiswa diserahkan oleh Yayasan Pepera Peduli Pendidikan Generasi Muda (Yayasan Pepera) sebagai wujud komitmen berkelanjutan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Bantuan ini difokuskan untuk membantu biaya perkuliahan mahasiswa yang sedang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Papua.</li><li>Secara simbolis, penyerahan ini bertujuan meningkatkan semangat belajar mahasiswa agar dapat menjadi SDM unggul bagi masa depan Papua.</li><li>Yayasan menegaskan konsistensinya dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia di Tanah Papua melalui pemberian hak pendidikan bagi keluarga pejuang.</li></ul>	 





2.	Menjadi narasumber materi : menjaga rumah besar papua: penguatan peran ondoafi dan kepala suku dalam bingkai NKRI	11.00 – selesai (13 Februari 2026)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengukuhkan kembali kedudukan Ondoafi dan Kepala Suku sebagai pemimpin spiritual dan sosial yang dihormati di tengah modernisasi.</li><li>2. Memperkuat sinergi antara Hukum Adat dan Hukum Negara agar berjalan beriringan demi ketertiban masyarakat di Papua.</li><li>3. Memberdayakan pemimpin adat sebagai pilar utama dalam mencegah konflik horisontal dan menangkal isu-isu yang dapat memecah belah persatuan.</li><li>4. Penguatan Ideologi: Mempertegas komitmen bahwa keberagaman adat Papua adalah kekayaan yang memperkokoh kedaulatan NKRI, bukan alasan pemisah.</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terciptanya hubungan yang harmonis antara Pemerintah (Formal) dan Lembaga Adat (Informal). Ondoafi tidak lagi berjalan sendiri, melainkan menjadi mitra strategis dalam perencanaan pembangunan daerah.</li><li>• Masyarakat adat menjadi lebih aktif dalam menyukseskan program pemerintah (seperti kesehatan dan pendidikan) karena adanya instruksi dan legitimasi langsung dari Kepala Suku yang mereka percayai.</li><li>• Penurunan potensi konflik horizontal dan vertikal. Ondoafi dan Kepala Suku berperan sebagai mediator utama dalam menyelesaikan sengketa di akar rumput sebelum meluas menjadi gangguan keamanan.</li><li>• Terjaganya hak atas tanah ulayat dan identitas budaya di tengah arus modernisasi dan industrialisasi. Penguatan ini memastikan suara OAP tetap menjadi penentu dalam setiap kebijakan strategis.</li></ul>	 
----	---	------------------------------------	---	---	--



3.	Menjadi moderator pada kegiatan Rapat Kerja PAK-HAM Papua dan Pelantikan Pengurus PAK-HAM Papua Periode 2026–2029.	08.00 – 15.30 WIT (18 Februari 2026)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memastikan prosesi pelantikan pengurus periode 2026–2029 berjalan khidmat dan sah secara organisasi, sehingga pengurus baru memiliki mandat kuat untuk bekerja.</li><li>2. Menyelaraskan visi-misi pengurus baru dengan isu HAM terkini di Papua, terutama perlindungan hak Orang Asli Papua (OAP) dan masyarakat adat.</li><li>3. Menghasilkan kesepakatan mengenai pola kerja sama antara PAK-HAM dengan pemerintah, lembaga adat, dan aparat keamanan agar tercipta pendekatan yang lebih humanis dalam penegakan HAM.</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prosesi pelantikan pengurus baru PAK-HAM Papua periode 2026–2029 terlaksana dengan tertib, khidmat, dan sah secara organisasi, sehingga kepengurusan memiliki legitimasi penuh untuk menjalankan program kerja.</li><li>• Tercapai keselarasan pemahaman antara pengurus terkait arah visi-misi organisasi dengan dinamika isu HAM terkini di Papua, khususnya perlindungan hak Orang Asli Papua dan masyarakat adat.</li><li>• Terbentuk kesepakatan awal mengenai pola koordinasi dan kerja sama lintas pihak sebagai dasar membangun pendekatan penegakan HAM yang lebih dialogis, kolaboratif, dan humanis.</li></ul>	 
----	--	--------------------------------------	--	---	---



4.	Konektivitas Kerja BP3OKP/BPP Bersama MRP	11.00 – 16.00 WIT (23 Februari 2026)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memastikan setiap anggota MRP menjalankan fungsi representasi adat, agama, dan perempuan sesuai dengan kode etik, sehingga dukungan terhadap program percepatan pembangunan memiliki legitimasi moral yang tinggi.</li><li>• Menyelaraskan tindakan anggota MRP dalam mengawal aspirasi masyarakat agar tetap sejalan dengan koridor hukum dan rencana strategis pembangunan yang disusun oleh BP3OKP/BPP.</li><li>• Menjadi forum koordinasi jika terjadi kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau aturan Otsus agar pelaksanaan program tetap lancar.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Masyarakat lebih percaya pada program pemerintah karena dikawal oleh anggota MRP yang bersih dan berintegritas di bawah pengawasan Dewan Kehormatan.</li><li>• Terciptanya iklim kerja yang kondusif di internal MRP, sehingga energi lembaga tidak habis pada konflik internal melainkan fokus pada kemitraan strategis dengan BP3OKP.</li><li>• Kebijakan percepatan pembangunan mendapatkan "restu" moral karena diproses melalui lembaga (MRP) yang menjunjung tinggi etika dan kehormatan.</li></ul>	 
----	---	--------------------------------------	---	---	---




5.	Kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat adat di Kampung Tobati Enggros oleh Anggota DPRD Kursi Otonomi Khusus, Bapak Ondo Gerson Hasor, yang dilaksanakan di wilayah Kota Jayapura.	(25 Februari 2026)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengawal aspirasi terkait pemanfaatan wilayah adat dan perlindungan hutan mangrove (hutan perempuan) di sekitar Teluk Youtefa.</li><li>• Memastikan dana Otonomi Khusus terserap langsung untuk kebutuhan dasar masyarakat di kampung-kampung adat.</li><li>• Membawa isu-isu lokal ke tingkat provinsi agar menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran dan regulasi daerah (Perdasus/Perdas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Teridentifikasi sebagai kebutuhan paling mendesak. Masyarakat di Tobati dan Enggros masih sangat bergantung pada pasokan air dari luar (tangki air) dengan biaya tinggi. Hasil penjaringan ini mendorong pengusulan pembangunan sumur bor atau perluasan jaringan pipa PDAM ke wilayah pesisir.</li><li>• Adanya komitmen untuk memperjuangkan regulasi perlindungan hutan mangrove dari ancaman sampah plastik dan pembalakan, mengingat fungsinya sebagai "hutan perempuan" dan area tangkapan kerang/ikan.</li><li>• Kesepakatan untuk mendorong pemerintah daerah memperbaiki infrastruktur dermaga dan fasilitas pendukung pariwisata agar Kampung Tobati dan Enggros menjadi destinasi unggulan di Kota Jayapura tanpa menghilangkan identitas adat.</li><li>• Hasil pertemuan merekomendasikan agar Dana Otsus ke depan tidak hanya fokus pada fisik besar, tetapi juga pada bantuan modal usaha bagi kelompok mama-mama penjual ikan dan kerajinan tangan.</li><li>• Penjaringan mencatat masih adanya anak-anak asli kampung</li></ul>	
----	--	--------------------	---	---	---



				<p>yang terancam putus sekolah, sehingga akan diperjuangkan alokasi beasiswa khusus melalui jalur Otsus.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aspirasi ini telah didokumentasikan untuk dibawa ke Sidang Paripurna DPRP. Sebagai anggota jalur pengangkatan (Otsus), Bapak Gerson Hasor memiliki mandat kuat untuk memastikan aspirasi ini menjadi prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).</li><li>• Terciptanya ruang dialog mengenai dampak pembangunan infrastruktur publik di sekitar teluk terhadap tanah ulayat, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penonton tetapi juga pemilik manfaat dari pembangunan tersebut.</li></ul>	
6.	Koordinasi tugas Anggota Pokja BP3OKP/BPP Perwakilan Provinsi Papua bersama Lembaga Pemasyarakatan Abepura terkait penanganan pelaku aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Keerom	(27 Februari 2026)	<ul style="list-style-type: none"><li>• BP3OKP menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa pelaku tambang ilegal (seperti kasus di Kali Pur, Distrik Senggi, Keerom) mendapatkan perlakuan hukum</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memastikan proses hukum terhadap pelaku (baik warga lokal maupun pihak luar) berjalan transparan dan adil sesuai regulasi yang berlaku dalam bingkai Otsus.</li><li>2. Mendorong program pembinaan di dalam Lapas yang memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan dampak buruk</li></ol>	



			<p>yang transparan dan profesional.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Menyelaraskan penegakan hukum dengan semangat Otsus, yaitu melindungi kekayaan alam Papua untuk sebesar-besarnya kemakmuran Orang Asli Papua (OAP).</li><li>• Koordinasi ini mencakup pengawasan terhadap tersangka (termasuk Warga Negara Asing dan warga luar Papua) yang terlibat dalam aktivitas tambang emas ilegal di Kilometer 30, Jalan Trans Senggi.</li><li>• BP3OKP bersama lembaga terkait (termasuk aspirasi dari MRP) menekankan bahwa aktivitas tambang ilegal di Keerom merusak hutan adat dan lingkungan hidup.</li></ul>	<p>pertambangan tanpa izin bagi ekosistem Papua.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Melakukan penggalian informasi melalui koordinasi terbatas untuk memetakan jaringan besar atau penyokong (cukong) di balik aktivitas ilegal tersebut guna mencegah munculnya kembali titik tambang baru.</li><li>4. Menjamin bahwa sanksi hukum yang diberikan memberikan efek jera guna melindungi tanah ulayat dan sumber daya alam masyarakat adat Keerom dari eksploitasi yang merusak.</li><li>5. Menyusun data akurat untuk dilaporkan kepada Ketua Badan Pengarah Papua (Wakil Presiden RI) sebagai bahan evaluasi kebijakan keamanan dan pengelolaan SDA di wilayah perbatasan.</li></ol>	
--	--	--	--	---	---



Kelompok Kerja  
Papua Polhukam Papua Polhukam Perwakilan Provinsi Papua

Nama Kegiatan	Rekomendasi
Penyerahan Beasiswa kepada Mahasiswa keluarga Pejuang PEPERA.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan pemutakhiran data (database) keturunan pejuang PEPERA secara menyeluruh di seluruh Tanah Papua.</li><li>• Menyesuaikan besaran bantuan dengan biaya hidup saat ini dan mempertimbangkan pemberian biaya riset/skripsi bagi mahasiswa tingkat akhir.</li><li>• Tidak hanya memberikan dana, tetapi juga menyelenggarakan pelatihan <i>soft skills</i>, kepemimpinan, dan kewirausahaan bagi para penerima.</li><li>• Membangun kemitraan antara Yayasan Pepera dengan Pemprov (lewat Dana Otsus) serta perusahaan-perusahaan di Papua untuk program magang.</li></ul>
Menjadi narasumber materi : menjaga rumah besar papua: penguatan peran ondoafi dan kepala suku dalam bingkai NKRI	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan regulasi (Perdasus/Perdasi) yang mempertegas tata kerja dan kedudukan hukum Lembaga Adat sebagai mitra sejajar pemerintah dalam pembangunan kampung.</li><li>• Mengusulkan alokasi dana Otsus untuk renovasi pusat-pusat pertemuan adat agar fungsi edukasi dan musyawarah tetap hidup bagi generasi muda.</li><li>• Setiap investasi di wilayah adat wajib melibatkan Ondoafi/Kepala Suku dalam mekanisme bagi hasil atau pemberdayaan tenaga kerja lokal, bukan hanya sekadar pemberian ganti rugi lahan.</li><li>• Mengusulkan adanya insentif atau tunjangan tetap bagi pimpinan adat sebagai bentuk apresiasi negara atas peran mereka menjaga stabilitas keamanan di akar rumput.</li><li>• Mendorong aparat penegak hukum untuk mengedepankan penyelesaian masalah sosial melalui jalur adat (mediasi Ondoafi) untuk kasus-kasus ringan guna menjaga harmoni warga.</li><li>• Membentuk wadah koordinasi berkala antara Tokoh Adat, TNI, dan Polri untuk deteksi dini isu provokatif atau hoaks yang dapat memecah belah persatuan.</li><li>• Memberikan pendampingan teknologi bagi pimpinan adat agar mampu menyuarakan aspirasi masyarakat adat secara positif melalui media sosial.</li></ul>
Menjadi moderator pada kegiatan Rapat Kerja PAK-HAM Papua dan Pelantikan Pengurus PAK-HAM Papua Periode 2026–2029	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memastikan seluruh struktur kepengurusan hingga tingkat daerah segera memiliki SK yang dikukuhkan secara hukum guna memperkuat posisi tawar dalam advokasi kebijakan.</li><li>• Mendorong pengurus baru untuk membangun kemitraan strategis dengan lembaga donor dan pemerintah tanpa mengorbankan independensi PAK-HAM sebagai lembaga pengawas.</li></ul>



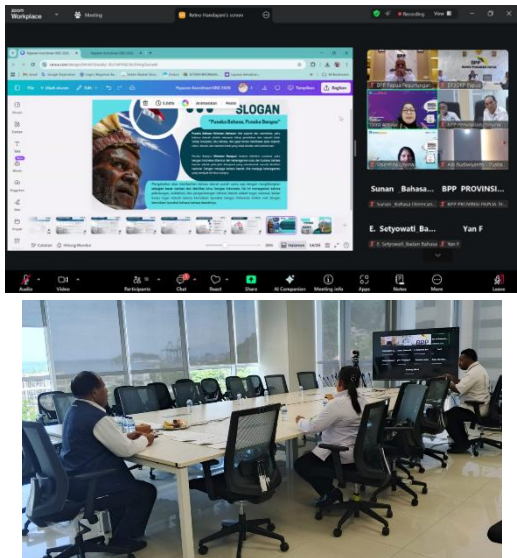

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menempatkan isu hak atas tanah ulayat, kesehatan, dan pendidikan bagi masyarakat adat sebagai prioritas utama dalam <i>roadmap</i> kerja tiga tahun ke depan.</li><li>• Pendekatan Humanis: Mengedepankan dialog dan mediasi dalam penyelesaian sengketa HAM, bekerja sama dengan tokoh adat (Ondoafi) dan tokoh agama guna menciptakan solusi yang damai.</li><li>• Membangun jalur komunikasi rutin dengan Badan Pengarah Papua dan Majelis Rakyat Papua untuk memastikan aspirasi masyarakat adat masuk dalam kebijakan strategis Otsus.</li><li>• Kolaborasi Aparat Penegak Hukum: Menginisiasi forum diskusi berkala dengan TNI/Polri untuk menyamakan persepsi mengenai penanganan konflik berbasis HAM di lapangan.</li><li>• Edukasi Masyarakat: Menyelenggarakan program "PAK-HAM Goes to Kampung" untuk memberikan pemahaman hukum dasar kepada warga asli Papua mengenai hak-hak mereka.</li><li>• Rapat Kerja Tahunan: Menetapkan mekanisme evaluasi program kerja setiap 6 bulan untuk memastikan setiap bidang menjalankan mandatnya sesuai visi-misi periode 2026–2029.</li></ul>
Konektivitas Kerja BP3OKP/BPP Bersama Dewan Kehormatan MRP	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pakta Integritas Bersama</li><li>• Mencegah terjadinya penolakan masyarakat akibat perilaku atau kebijakan oknum anggota lembaga yang dianggap melanggar norma adat/etika.</li><li>• Menyarankan Dewan Kehormatan MRP untuk melakukan pengawasan internal terhadap keterlibatan anggota MRP dalam pemanfaatan dana Otsus yang dikoordinasikan oleh BP3OKP.</li><li>• BP3OKP merekomendasikan pelatihan berkelanjutan bagi Dewan Kehormatan MRP mengenai regulasi terbaru (PP No. 106 &amp; 107 Tahun 2021) agar fungsi pengawasan etik mereka sejalan dengan aturan hukum negara.</li><li>• Membangun mekanisme rujukan (referral) di mana BP3OKP dapat meneruskan laporan masyarakat terkait kinerja/etika anggota MRP kepada Dewan Kehormatan untuk ditindaklanjuti secara internal.</li><li>• Memotivasi seluruh anggota lembaga untuk bekerja secara profesional dan bermartabat dalam bingkai NKRI.</li></ul>
Kegiatan penjangkauan aspirasi masyarakat adat di Kampung Tobati Enggros oleh Anggota DPRD Kursi Otonomi Khusus, Bapak Ondo Gerson Hasor, yang dilaksanakan di wilayah Kota Jayapura.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mendorong Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan PDAM untuk segera mengalokasikan anggaran pembangunan sumur bor terlindungi atau sistem perpipaan bawah laut yang menjangkau pemukiman pesisir Tobati-Enggros.</li><li>• Mengusulkan pembentukan Peraturan Daerah Khusus (Perdaskus) atau Peraturan Kampung (Perkam) yang memproteksi Hutan Mangrove (Sajoro) dari pembuangan sampah dan penebangan liar.</li><li>• Menyarankan pengadaan kapal pengangkut sampah rutin dan jaring penghalang sampah di muara sungai yang bermuara ke Teluk Youtefa.</li></ul>






	<ul style="list-style-type: none"><li>• Merekomendasikan alokasi Dana Otsus jalur pemberdayaan ekonomi untuk pengadaan alat pengolahan ikan, kerajinan tangan, dan stand jualan yang layak di area wisata.</li><li>• Mendorong Dinas Pariwisata untuk memberikan pelatihan pemandu wisata bagi pemuda lokal agar Kampung Tobati-Enggros menjadi destinasi wisata religi dan budaya yang terkelola profesional.</li><li>• Mengusulkan kuota beasiswa Otsus yang diprioritaskan bagi anak-anak asli Kampung Tobati dan Enggros, terutama untuk jenjang perguruan tinggi dan sekolah vokasi kelautan/pariwisata.</li><li>• Merekomendasikan peninjauan kembali kompensasi atau manfaat berkelanjutan bagi masyarakat adat atas penggunaan ruang laut dan darat akibat pembangunan jembatan/jalan nasional di wilayah tersebut.</li><li>• Mendorong percepatan pemetaan dan sertifikasi komunal tanah ulayat untuk mencegah sengketa lahan di masa depan.</li><li>• Menyarankan pemerintah kota/provinsi memberikan dukungan fasilitas operasional bagi lembaga adat kampung agar fungsi koordinasi dan penyelesaian masalah internal warga berjalan maksimal.</li></ul>
<p>Koordinasi tugas Anggota Pokja BP3OKP/BPP Perwakilan Provinsi Papua bersama Lembaga Pemasyarakatan Abepura terkait penanganan pelaku aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Keerom</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Merekomendasikan BP3OKP untuk merangkul para Ondoafi di Keerom dalam memberikan sanksi sosial atau denda adat tambahan bagi pelaku yang merusak wilayah ulayat, sebagai pelapis hukum negara.</li><li>• Mengusulkan penambahan pos pantau di jalur-jalur tikus (seperti di Distrik Senggi) yang melibatkan Satpol PP dan masyarakat lokal untuk menutup akses logistik bagi penambang ilegal.</li><li>• Menyusun laporan berkala mengenai tren pelaku tambang ilegal di Keerom (termasuk keterlibatan pihak luar) untuk diserahkan kepada Ketua Badan Pengarah Papua (Wakil Presiden RI) guna perbaikan regulasi pengamanan SDA di wilayah perbatasan</li></ul>



Kelompok Kerja  
Papua Cerdas Perwakilan Provinsi Papua

No	Kegiatan Strategis	Waktu (Tanggal)	Tujuan	Hasil	Gambar (Muat 1 – 2 Gambar)
1.	RAKOR : Kongres Bahasa Daerah – Badan Bahasa & Balai Bahasa	11.00 – 14.40 WIT (2 Februari 2026)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membahas Tahapan Kongres Bahasa Daerah</li><li>- Rincian Biaya</li></ul>	BP3OKP akan berkoordinasi dengan Pemda untuk kelancaran kegiatan dan dilanjutkan pembentukan Panitia (SK Menteri)	
2.	Penyerahan Beasiswa kepada Mahasiswa keluarga Pejuang PEPERA.  Papua Cerdas	09.00 – 12.00 WIT (6 Februari 2026)	Penghargaan sejarah, investasi SDM, dan penguatan sinergi kelembagaan	Terlaksananya penyaluran beasiswa serta rekomendasi kemitraan, afirmasi pendidikan, dan publikasi narasi kebangsaan	



3.	Diskusi Pembahasan Persiapan Kongres Bahasa Daerah 2026.  Papua Cerdas	10.00 – 12.00 WIT (20 Februari 2026)	Menindaklanjuti rapat sebelumnya untuk melihat arah tindak lanjut persiapan kongres	- Menentukan Ekidna (Hewan Endemik Papua) sebagai mascot	
4.	Konektivitas Kerja BP3OKP/BPP Bersama MRP	11.00 – 16.00 WIT (23 Februari 2026)	Membahas korelasi dengan Dewan Kehormatan MRP Papua	Tindak lanjut pertemuan lanjutan untuk memperkuat sinergitas Lembaga-lembaga otonomi khusus papua	
5.	Rapat Pembentukan Panitia KBD	11.00 – 13.00 WIT (25 Februari 2026)	Membahas posisi dan struktur personal dalam SK Panitia Kongres Bahasa Daerah	Draft perlu di diskusikan internal untuk melihat posisi strategis dalam kepanitiaan.	





Kelompok Kerja  
Papua Cerdas Perwakilan Provinsi Papua




No	Nama Kegiatan	Rekomendasi
1.	RAKOR : Kongres Bahasa Daerah – Badan Bahasa & Balai Bahasa	Koordinasi intens dengan Pemda Prov/Kab/Kota untuk keberlangsungan kegiatan
2.	Penyerahan Beasiswa kepada Mahasiswa keluarga Pejuang PEPERA.	Koordinasi intens dengan Pemda Prov/Kab/Kota untuk keberlangsungan kegiatan
3.	Diskusi Pembahasan Persiapan Kongres Bahasa Daerah 2026.	Perlu dukungan jasa designer 3d dan animator untuk display mascot kongres
4.	Konektivitas Kerja BP3OKP/BPP Bersama MRP	Jadwalkan pertemuan rutin triwulan untuk penguatan dan sinergisitas antar Lembaga
5.	Rapat Pembentukan Panitia KBD	Panitia perlu di bentuk dengan komposisi panitia local dan pusat untuk memudahkan koordinasi.



Kelompok Kerja  
Papua Produktif Perwakilan Provinsi Papua

No	Kegiatan Strategis	Waktu (Tanggal)	Tujuan	Hasil	Gambar (Muat 1 – 2 Gambar)
1.	Diskusi pengembangan usaha OAP berbasis klan dan marga meliputi sagu, pala, kayu manis, dan penampungan ikan bagi nelayan binaan.	09.00 – 11.00 WIT (2 Februari 2026)	Mendapat masukan dan data oleh kelompok masyarakat adat.ttg usaha pembenihan ikan air tawar dan Kawasan utk penanaman pohon sagu.	1. Akte Pendirian Yayasan Khouw Bersatu Papua. 2. Proposal revitasasii Kawasan tanaman sagu. 3. Proposala pengembangan budidaya ikan air tawar di danau sentani. 4. Proposal Unit pembenihan rakyat (UPR ).	
2.	Kunjungan lapangan lanjutan dalam rangka pembahasan usaha penampungan ikan bagi OAP di Sentani.	10.00 – 16.00 WIT (4 Februari 2026)	Melihat usaha pembenihan ikan air tawar di danau sentani dan lahan penanaman sagu yg telah di siapkan oleh masyarakat adat disekitar danau sentani.	Dari hasil kunjungan lapangan BP3OKP perlu mendpt perhatian dan pengembangan Pemerintah.	



3.	Rapat koordinasi DPR Papua bersama BPP Provinsi Papua.	11.00 – 13.00 WIT (19 Februari 2026)	FGD Utk mendpt ttg pelaksanaan tugas sebagaimana yg diamanatkan dlm PP nmr. 106 Thn 2021 ttg kewenangan dan kelembagaan dlm pelaksanaan kebijakan OTSUS.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Evaluasi dan Koordinasi akan selalu dilakukan.</li><li>2. Fraksi DPR akan melakukan Koordinasi dengan Pokja-pokja di BP3OKP.</li></ol>	
4.	Konektivitas Kerja BP3OKP/BPP Bersama MRP	11.00 – 16.00 WIT (23 Februari 2026)	Mendengar dan mendapat masukan dari Dewan Kehormatan (DK) MRP	<ol style="list-style-type: none"><li>1. BP3OKP akan mengundang Dewan Kehormatan MRP secara khusus untuk mendapat penjelasan.</li><li>2. Kesepakatan bersama untuk slalu berkoordinasi.</li></ol>	 



5.	Rapat secara zoom Singkronisasi dan Koordinasi BP3OKP /Pokja Papua Produktif dengan Media DPP.Apkasido Pusat terkait rencana PSR.	Kamis, 26 Feb. 2026	Memberikan informasi kepada media Apkasindo ttg apa yg menjadi kendala dan kebutuhan dalam rangkalah pengembangan PSR di Prov. Papua.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana meyiapkan media lokal utk menyerap kebutuhan petani Kelapa sawit.</li><li>2. Bagaiman media lokal ikut terlibat menepis isu-isu negative yg berkembang ttg kelapa sawit sebagai komoditi yg strategis.</li></ol>	
6.	Koordinasi dan evaluasi BP3OKP/Pokja Papua Produktif terkait rencana PSR yg akan dilakukan di Kab. Keerom bersam Kep. Dinas Pertanian Keerom, DPW Apkasindo Papua dan DPD Apkasindo Kab Keerom	11.51 – 13.21 WIT Jumat, 27 Februari 2026	Mendengar dan mendapat masukan dari Dinas Pertanian Kab. Keerom tetapi juga upaya yg sudah dilakukan DPW dan DPD Apkasindo.Papua utk Pengembangan PSR.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Koordinasi ttg data Petani.</li><li>2. Akan dilakukan PSR seluas 3.600 ha di Kab.Keerom.</li></ol>	 



## Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua

GKN Lantai 4 Jl. Ahmad Yani Jayapura Papua

Kelompok Kerja  
Papua Produktif Perwakilan Provinsi Papua

No	Nama Kegiatan	Rekomendasi
1.	Diskusi pengembangan usaha OAP berbasis klan dan marga meliputi sagu, pala, kayu manis, dan penampungan ikan bagi nelayan binaan.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sagu sebagai sebagai komoditi yang akan menopang pangan dunia.</li><li>2. Sagu adalah pilar ketahanan pangan nasional sekaligus menggugat dominasi beras yg telah meminggirkan kekayaan pangan lokal Indonesia.</li><li>3. Anggota BPP bersama Pokja Papua Produktif akan menindak lanjuti dengan komunikasi dan rencana tindak lanjut.</li></ol>
2.	Kunjungan lapangan lanjutan dalam rangka pembahasan usaha penampungan ikan bagi OAP di Sentani.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perlu mengidentifikasi potensi pengembangan pembenihan ikan air tawar didanau Sentani.</li><li>2. Perlu ada tempat pengelola pembenihan ikan air tawar di danau sentani.</li><li>3. Perlu adanya sarana prasarana untuk pembenihan ikan air tawar tersebut.</li><li>4. Meningkatkan kerja sama antara Dinas Perikanan Provinsi, Kabupaten dan BP3OKP utk pengelolah pembenihan ikan air tawar.di danau sentani.</li></ol>
3.	Rapat koordinasi DPR Papua bersama BPP Provinsi Papua.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. BP3OKP harus meningkatkan koordinasi dengan DPRD Kelompok khusus dlm pelaksanaan OTSUS.</li><li>2. DPRD Kelompok Khusus harus meningkat pengawasan terhadap Pelaksanaan OTSUS.</li><li>3. Pemerintah Prov. Papua harus meningkatkan partisipasi masyarakat dlm Pelaksanaan OTSUS</li><li>4. BP3OKP harus transparansi dan akuntabilitas dalam Pelaksanaan OTSUS.</li></ol>
4.	Konektivitas Kerja BP3OKP/BPP Bersama MRP	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengadakan Koordinasi dgn berbagai pihak termasuk Kesbangpol dan Kementerian Dalam negeri.</li><li>2. Varifikasi prosedur dan proses pengangkatan Pejabat MRP.</li><li>3. Segera melaksanakan rapat pleno setelah evaluasi dilaksanakan MRP secara Internal.</li><li>4. Menyusun mekanisme dan dasar hukum yg jelas utk kegiatan Lembaga MRP.</li></ol>
5.	Rapat secara zoom Singkronisasi dan Koordinasi BP3OKP /Pokja Papua Poduktif dengan Media DPP.Apkasido Pusat terkait rencana PSR.	Agar BP3OKP bersama DPW Apkasido Papua menyiapkan media lokal agar dapat meng-imput hal-hal yg menjadi kebutuhan pengembangan kelapa Sawit dan juga menangkal isu-isu negative yg berkembang ttg kelapa sawit sbg komoditi strategis nasional.
6.	Koordinasi dan evaluasi BP3OKP/Pokja Papua Produktif terkait rencana PSR yg akan dilakukan di Kab. Keerom bersam Kep. Dinas Pertanian Keerom, DPW Apkasindo Papua dan DPD Apkasindo Kab Keerom	Dinas Pertanian Kab. Keerom dan Apkasindo, bekerja sama dengan Gapoktan mempersiapkan data petani kelapa sawit di Keerom agar dilakukan PSR (Penanaman Sawit Rakyat).



**Kesimpulan Keseluruhan Kegiatan Pokja BPP Papua Polhukam Bulan Februari 2026 :**



Secara keseluruhan, Pokja Papua Produktif Provinsi Papua telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi Orang Asli Papua (OAP) melalui penguatan usaha berbasis klan dan marga.

Kegiatan tersebut meliputi pengembangan komoditas unggulan OAP seperti sagu, pala, dan kayu manis; koordinasi usaha penangkaran ikan di Danau Sentani; pertemuan kelembagaan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Kelompok Khusus (DPRP Kelompok Khusus) sesuai amanat PP 106/2021; penguatan konektivitas bersama Dewan Kehormatan MRP; koordinasi dengan DPP Apkasindo Pusat terkait akses informasi petani sawit OAP; serta sinergi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Keerom.

Dengan demikian, Pokja Papua Produktif telah menunjukkan komitmen nyata dalam mendorong peningkatan produksi, kualitas, dan akses pasar usaha OAP, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adat secara berkelanjutan.



Kelompok Kerja  
Papua Sehat Perwakilan Provinsi Papua

No	Kegiatan Strategis	Waktu (Tanggal)	Tujuan	Hasil	Gambar (Muat 1 – 2 Gambar)
1.	Konektivitas Kerja BP3OKP/BPP Bersama MRP	11.00 – 16.00 WIT (23 Februari 2026)	Menyelaraskan tugas dan fungsi, memperkuat koordinasi kelembagaan, serta membangun sinergi program dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.	Pemahaman bersama bahwa kolaborasi lintas lembaga merupakan fondasi utama dalam mendorong percepatan pembangunan Papua yang berkeadilan, berkelanjutan, serta tetap menghormati nilai-nilai adat, kearifan lokal, dan martabat masyarakat asli Papua. Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga kesinambungan koordinasi serta memperkuat kemitraan kelembagaan demi tercapainya tujuan pembangunan yang inklusif dan berdaya guna bagi masyarakat	 



Kelompok Kerja  
Papua Sehat Perwakilan Provinsi Papua

No	Nama Kegiatan	Rekomendasi
1.	Konektivitas Kerja BP3OKP/BPP Bersama MRP	Perlu dilakukan pertemuan lanjutan antara BP3OKP / BPP dan MRP Papua bersama Dewan Kehormatan MRP Papua guna membangun mekanisme koordinasi tetap, sehingga sinergi pelaksanaan program Dana Otsus Papua dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan.

**Kesimpulan Kegiatan Pokja Papua Papua Sehat Bulan Februari :**

Kegiatan konektivitas kerja antara BP3OKP / BPP dan MRP Papua menegaskan pentingnya sinergi dan koordinasi lintas lembaga sebagai kunci percepatan pembangunan Papua yang berkeadilan, berkelanjutan, serta menghormati nilai adat dan martabat masyarakat asli Papua.



**Kesimpulan Keseluruhan :**

Kesimpulan Seluruh Kegiatan yang merupakan rangkaian inisiatif strategis Pokja Polhukam dalam memajukan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan adat, penegakan hukum, dan advokasi kebijakan di Tanah Papua:

**1. Sinergi Pembangunan Berbasis Kultural dan Hukum**

Seluruh rangkaian kegiatan menunjukkan adanya benang merah antara Pemerintah (BP3OKP/DPRP), Lembaga Kultural (MRP/Ondoafi), dan Lembaga Hukum (PAK-HAM/Lapas).

Percepatan Pembangunan Papua tidak dapat berjalan secara teknokratis saja, melainkan harus mendapat legitimasi dari para pimpinan adat (Ondoafi) dan pengawasan etika yang ketat dari Dewan Kehormatan MRP.

**2. Investasi SDM sebagai Warisan Sejarah**

Program Beasiswa Mahasiswa Keluarga Pejuang PEPERA merupakan bentuk konkret dari penghormatan terhadap sejarah integrasi Papua.

Negara melalui yayasan terkait hadir untuk memastikan bahwa keturunan para pejuang tidak tertinggal secara intelektual, sehingga mereka dapat menjadi subjek utama dalam mengisi pembangunan di masa depan.

**3. Perlindungan Hak Masyarakat Adat dan Lingkungan**

Kegiatan penjarangan aspirasi di Kampung Tobati-Enggros dan penanganan tambang ilegal di Keerom menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap hak ulayat (seperti hutan mangrove dan lahan ulayat) adalah prioritas mendesak. Penegakan hukum terhadap penambang ilegal bukan sekadar masalah pidana, tetapi upaya menyelamatkan ekosistem Papua dari kerusakan permanen.

**4. Penguatan Institusi Advokasi dan Penegakan HAM**

Pelantikan dan Raker PAK-HAM Papua 2026–2029 menandai babak baru bagi advokasi kebijakan yang lebih humanis. Kesimpulannya, keberadaan organisasi advokasi yang independen namun bersinergi dengan pemerintah sangat dibutuhkan untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan (Otsus) tetap menghormati standar hak asasi manusia.

**5. Integrasi Nasional dalam Bingkai "Rumah Besar Papua"**

Melalui peran sebagai narasumber materi Ondoafi, kesimpulan besarnya adalah bahwa NKRI merupakan payung pelindung bagi keberagaman adat Papua. Penguatan peran kepala suku bukan bertujuan menciptakan eksklusivitas, melainkan memperkokoh pilar-pilar lokal agar mampu menahan arus globalisasi dan menjaga persatuan bangsa.

**Rangkuman Akhir**

Secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan ini merefleksikan implementasi Otonomi Khusus Papua yang lebih tertata, di mana:

- Aspirasi diserap langsung dari kampung (Tobati-Enggros).
- Hukum ditegakkan secara koordinatif (Keerom & Lapas Abepura).
- Pendidikan dijadikan instrumen penghargaan sejarah (Beasiswa Pepera).
- Etika dan Kehormatan dijaga melalui kemitraan strategis (BP3OKP & Dewan Kehormatan MRP).



## **Kesimpulan**

Pelaksanaan berbagai kegiatan strategis BP3OKP Provinsi Papua sepanjang bulan Februari 2026 menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua melalui empat klaster utama, yaitu **Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Polhukam**.

- Masalah tata kelola, akuntabilitas, dan pengawasan penggunaan dana Otsus masih menjadi tantangan utama di hampir semua sektor.
- Keterpaduan lintas lembaga dan sektor (pemerintah, TNI/Polri, gereja, dan masyarakat adat) perlu diperkuat agar program sosial, ekonomi, dan infrastruktur berjalan efektif dan tepat sasaran.
- Pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat masih perlu dukungan besar, baik dalam hal anggaran, sarana prasarana, maupun sumber daya manusia.
- Perlu langkah cepat dari pemerintah daerah dan pusat untuk melakukan audit, evaluasi, dan penataan ulang terhadap pelaksanaan program Dana Otsus, agar benar-benar memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan OAP di Provinsi Papua.

Rangkaian rekomendasi yang dihasilkan menekankan pentingnya **sinkronisasi kebijakan pusat daerah, peningkatan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat adat, serta kolaborasi lintas sektor** untuk memastikan keberlanjutan pembangunan Papua secara inklusif.

## **Penutup**

Demikian laporan hasil kegiatan strategis beserta rekomendasi yang telah disusun oleh Anggota Badan dan Kelompok Kerja (Pokja). Melalui rangkaian koordinasi, kunjungan kerja, serta dialog bersama pemangku kepentingan di berbagai sektor, diperoleh gambaran nyata mengenai kondisi pembangunan dan tantangan yang dihadapi masyarakat, khususnya terkait pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus), pelayanan dasar, serta tata kelola pemerintahan di daerah.

Hasil kegiatan ini diharapkan dapat menjadi **bahan pertimbangan dan acuan kebijakan** bagi Pemerintah Provinsi Papua, serta Pemerintah Pusat dalam merumuskan langkah strategis ke depan. Diperlukan komitmen bersama dari seluruh pihak pemerintah, lembaga keagamaan, aparat keamanan, tokoh adat, dan masyarakat untuk memastikan setiap program dan kegiatan benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).

Melalui pelaksanaan rekomendasi yang telah dirumuskan, diharapkan tercipta tata kelola pembangunan yang **transparan, akuntabel, dan berkeadilan**, dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta perlindungan hak-hak adat dan kemanusiaan.

Akhirnya, semoga laporan ini dapat menjadi dasar penguatan sinergi lintas sektor dalam mewujudkan **Papua yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Bermartabat** menuju kesejahteraan masyarakat Papua yang berkelanjutan.